

RENCANA
KERJA
PERANGKAT DAERAH
Dinas Komunikasi dan informatika
KOTA CIMAHI TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan kepada kita, yang juga atas berkenan-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 dapat diselesaikan. RencanaKerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai pelaksanaan dan penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026.

Terimakasih pula kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 ini. Dokumen Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan dan menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI	 1
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023)	 1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	 18
2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .	23
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	24
3.3. Program dan Kegiatan	25
 BAB IV PENUTUP	 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi baik pada aspek lingkungan maupun kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Cimahi.

Penyusunan Renja mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 22 Desember 2021 telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi. Dengan diberlakukannya peraturan Daerah tersebut yang awalnya Dinas Komunikasi, Informatika, Kerasipan dan Perputakaan Kota Cimahi berubah menjadi dua dinas yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Arsip Daerah. Dalam Pasal 6 ayat 2 huruf p disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Dengan perubahan tersebut maka harus disusun rencana kerja sebagai landasan pelaksanaan bagi program dan kegiatan yang dilaksana oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.

Dengan disusunnya rencana kerja ini diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat memberikan dukungan terhadap pencapaian visi misi Kota Cimahi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

- a) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
- b) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g) Kepres No. 50 tahun 1997 tentang Pedoman Umum Perpustakaan
- h) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencana Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan dokumen dasar bagi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah merencanakan pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai tahapan untuk mencapai target akhir Renstra untuk Mewujudkan Cimahi Kota Cerdas (Creative, Egalitarian, Religius, Developable, Accretive dan Sustainable).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.5. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Maksud dan Tujuan,

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

Mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023)

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2022)

Berdasarkan Rencana Strategi Dinas Komuikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026, pagu anggaran Belanja yang diharapkan untuk kinerja yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 17.728.288.789,00. Perbandingan Anggaran belanja berdasarkan Rencana Strategis dengan DPA Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Pagu Anggaran Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi

URAIAN	Jumlah (Rp.)	Prosentase (%)
Pagu Anggaran Belanja Rencana Strategis Tahun 2022	17.728.288.789	
Pagu Anggaran Belanja DPA Tahun 2022	13.628.765.080	76,87%

Hasil evaluasi terhadap pencapaian target Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 2.2. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	Nilai SAKIP Dinas	BB	BB	100%
2	Meningkatnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,19	3,09%	97%
3	Meningkatnya tata kelola statistik sektoral daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah melakukan integrasi data statistik sektoral	85%	93,33%	110%

Capaian sasaran strategis meningkatkan akses membaca masyarakat dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi mencapai capaian 100%

Terdapat 3 urusan dan 1 non urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, yang terdiri dari 5 program dan 13 kegiatan. Pencapaian sasaran program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 Kota Cimahi per urusan sebagai berikut:

a. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

Tabel 2.5. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, Bidang Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN (Rp)
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	
	BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK					
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Pengembangan e-Government Daerah	persen	80	91	2.948.870.041
1	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perangkat daerah yang menggunakan domain cimahikota.go.id	persen	86	100	1.755.846.731
2	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase cakupan layanan TIK;	persen	50	100	1.193.023.310
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	persen	60	60	2.201.571.112
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	persen	80	100	2.201.571.112
	URUSAN STATISTIK					
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik daerah	persen	65	93,33	254.577.732
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah publikasi Data Statistik Kota Cimahi;	publikasi	2	2	254.577.732

b. Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian

Tabel 2.6. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Persandian

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGAR AN
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISA SI 2022	
	BIDANG PERSANDIAN					
	URUSAN PERSANDIAN					
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	persen	35	100	363.137.120
1	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	persen	55	75,46	68.450.100
2	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	persen	55	100	294.687.020

c. Urusan Penunjang

Tabel 2.8. Capaian Target Sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, Urusan Penunjang

N O	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				ANGGARAN
		URAIAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	
	URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN					
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP		75,65	75,83	6.015.589.013
1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	persen	100	100	41.112.498
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pesentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	persen	75	75	14.148.995
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase penyediaan administrasi umum	persen	12	12	331.691.645
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	12	12	82.956.019
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	persen	12	12	129.286.400
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan	pegawai	48	43	5.700.000
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi keuangan terlaksana	persen	100	100	5.410.693.456

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.9. Realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	Pagu Anggaran Tahun 2022	13.628.765.080
2	Realisasi Anggaran s.d. Desember 2022	11.783.745.018
3	Persentase realisasi anggaran	86,46%.

Realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.10. Realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN (%)
A	BIDANG INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK			
I	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
a	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	3.778.149.120	2.948.870.041	78,05
1	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.550.401.620	1.755.846.731	68,85
2	Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.227.747.500	1.193.023.310	97,17
b	Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.384.057.700	2.201.571.112	92
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.384.057.700	2.201.571.112	92
II	URUSAN STATISTIK			
a	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	263.938.000	254.577.732	96,45
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	263.938.000	254.577.732	96,45
B	BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT & PERSANDIAN			
III	URUSAN PERSANDIAN			
a	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	368.964.000	363.137.120	98,42
1	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000	68.450.100	97,79

NO	URUSAN/PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN PENYERAPAN ANGGARAN (%)
2	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	298.964.000	294.687.020	98,57
IV	SEKRETARIAT			
a	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.833.656.260	6.015.589.013	88,03
1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.448.500	41.112.498	99,19
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.200.000	14.148.995	99,64
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	331.829.000	331.691.645	99,96
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.566.000	82.956.019	94,74
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.843.000	129.286.400	98,81
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.700.000	5.700.000	100,00
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.222.069.760	5.410.693.456	86,96

B. Perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023)

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dinas Komunikasi dan Informatika			
	I.1	Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Nilai Sakip Pemerintah Daerah	71 (BB) 6.736.938.232
A	I.1.1	Kegiatan	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	12 dokumen 6.106.051.632
1	I.1.1.2	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 ASN 6.090.068.332
		Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 dokumen 15.983.300
B	I.1.2	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daera	12 dokumen 17.400.000
		Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen kendaraan operasional roda 2 dan roda 4 yang diasuransikan	17.400.000

No.		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022	
					Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	I.1.2	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	236.116.000
	14	I.1.2.11 Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	22.596.400
	15	I.1.2.12 Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	15.459.000
	23	I.1.2.20 Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	23.111.600
	25	I.1.2.22 Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	174.949.000
		Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan	91.079.000
	I.1.2.17	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16 laporan	41.090.000
	I.1.2.15	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 laporan	3.800.000
	I.1.2.14	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16 laporan	46.189.000
		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	125.477.000
		Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	49.510.000
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	55.810.000
		Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	20.157.000
C	I.1.3	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	100 persen	8.600.000
	31	I.1.3.6 Sub Kegiatan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	40 pegawai	8.600.000
D	I.1.4	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	100%	78.633.000
		Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	21.128.000
		Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen	57.505.000
	III	Urusan	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022	
				Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
III.1	Program	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	2,5 indeks	3.430.088.800
III.1.1	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	85 persen	1.615.105.500
III.1.1.1	Sub Kegiatan	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	357.400.000
III.1.1.2	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	594.205.500
III.1.1.3	Sub Kegiatan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	438.500.000
III.1.1.4	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	75.000.000
III.1.1.5	Sub Kegiatan	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	150.000.000
III.1.2	Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	90 Persen	1.814.983.300
III.1.2.1	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	75 Unit	1.814.983.300
III.2	PROGRAM	INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60 Persen	2.107.129.800
III.2.1	Kegiatan	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif	82 Persen	2.107.129.800
III.2.1.1	Sub Kegiatan	<i>Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	241.904.800
III.2.1.2	Sub Kegiatan	<i>Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik</i>	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	121.960.000
III.2.1.3	Sub Kegiatan	<i>Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media</i>	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 Layanan	1.743.265.000
V	Urusan	PERSANDIAN			
V.1	PROGRAM	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	33,33 Persen	409.280.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Tahun 2022	
					Target Capaian Kinerja	Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
V.1.1	Kegiatan	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	10 Persen	80.020.000	
V.1.1.1	Sub Kegiatan	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	80.020.000	
V.1.2	Kegiatan	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	3 Persen	329.260.000	
V.1.2.1	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	106.500.000	
V.1.2.2	Sub Kegiatan	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15 Perangkat Daerah	222.760.000	
VI	Urusan	STATISTIK				
VI.1	PROGRAM	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	37 Persen	243.938.500	
VI.1.1	Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	250 Data set	243.938.500	
VI.1.1.1	Sub Kegiatan	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	216.750.000	
VI.1.1.2	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	27.188.500	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut :

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi melaksanakan 3 urusan yang menjadi kewenangan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan Urusan Statistik. Pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis layanan, yaitu:

a. Layanan Publik Secara Langsung

Terdiri dari : Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Informasi, Layanan Publikasi

b. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

Terdiri dari : Layanan Data Statistik, Layanan Publikasi, Layanan Dokumentasi, Layanan Aplikasi TIK, Layanan Infrastruktur Jaringan TIK, Layanan Persandian.

Kinerja masing-masing layanan tersebut didukung oleh beberapa aspek kinerja, sehingga untuk mengevaluasi kinerja layanan tersebut dilakukan analisa terhadap capaian indikator masing-masing aspeknya. Capaian kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai berikut:

A. Layanan Publik Secara Langsung

a. Layanan Pengaduan Masyarakat

Layanan Pengaduan Masyarakat dilakukan melalui aplikasi PESDUK (Pesan Penduduk), layanan surat baik elektronik maupun fisik, pengaduan langsung dan pengaduan melalui media massa. Secara umum layanan Pengaduan Masyarakat cukup baik karena hampir semua pengaduan selalu direspon oleh pengelola. Namun kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah pada tindak lanjut terhadap masalah yang disampaikan oleh masyarakat yaitu tidak terkontrolnya penanganan permasalahan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu layanan Pengaduan Masyarakat belum terintegrasi dengan instansi/lembaga Pemerintah instansi vertikal antara lain kepolisian, BPN, Kementerian Agama, BPS.

b. Layanan Informasi

Layanan Informasi, secara fisik telah mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya renovasi loket pelayanan. Layanan ini didukung oleh Tim PPID Kota Cimahi yang terdiri dari PPID Utama yaitu Kepala Bidang IKPS Dinas Komunikasi dan Informatika dan PPID Pembantu yaitu Sekretaris Perangkat Daerah Kota Cimahi. Kendala yang dihadapi dalam layanan ini adalah:

1. Belum adanya SOP untuk melakukan Uji Konsekuensi Informasi pada PPID Kota Cimahi
2. Pengetahuan terkait Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi yang dirasa masih kurang pada PPID Pembantu di tiap Perangkat Daerah.
3. Belum terbentuknya KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Kota Cimahi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
4. Informasi pada website Pemerintah Kota Cimahi kurang *ter-update*

c. Layanan Publikasi

Layanan Publikasi dilaksanakan melalui media sosial dan kerjasama dengan media massa. Layanan publikasi melalui media sosial terdapat 2 yaitu Facebook dan Instagram. Publikasi melalui media sosial meliputi publikasi kegiatan-kegiatan Kepala Daerah, capaian-capaian pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta program-program prioritas. Sedangkan publikasi melalui media massa meliputi berbagai media koran/majalah, media *online*, media radio dan media televisi. Publikasi melalui media massa meliputi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi. *Pers release* dilakukan untuk program-program prioritas Pemerintah Kota Cimahi.

Kendala yang dihadapi dalam layanan publikasi, sebagai berikut:

1. Publikasi melalui media sosial mempunyai kecenderungan terfokus pada aktivitas Kepala Daerah dan kurang didukung oleh narasi tentang pembangunan.
2. Publikasi melalui media sosial kurang mendapat respon dari masyarakat karena kecenderungan komunikasi yang dilakukan hanya satu arah yaitu respon dari masyarakat tidak diberikan tanggapan karena tidak didukung dengan tim melainkan hanya dilaksanakan oleh operator.
3. Tidak ada *feedback* dari analisis berita yang dilakukan sebagai bahan penyusunan perencanaan publikasi.

B. Layanan Publik Secara Tidak Langsung

a. Layanan Data Statistik

Untuk Layanan Data Statistik, pada tahun 2017 telah dibangun aplikasi OPEN DATA sebagai sarana publikasi data statistik sektoral Pemerintah Kota Cimahi. Sebagai Wali Data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi mempunyai tugas memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data dan Metadata; dan membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah. Kendala yang dihadapi dalam layanan Data Statistik adalah:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral antara “Bappeda dengan Diskominfo;
2. Pengelola Data pada PD dibebani pekerjaan pengumpulan data dari berbagai instansi (Bappeda, Setda, Kominfo, Instansi Vertikal) sehingga tidak fokus;
3. Pemahaman tentang statistik sektoral masih rendah dan masih terbatasnya SDM yang berlatar belakang pendidikan Statistik, kemampuan analisis dan grafis;
4. Penggunaan *Platform* yang berbeda pada aplikasi yang dibangun perangkat daerah sehingga menghambat proses integrasi.

b. Layanan Dokumentasi

Layanan Dokumentasi dilakukan hanya kegiatan pimpinan kepala daerah.

c. Layanan Aplikasi TIK

Layanan Aplikasi TIK meliputi layanan domain dan subdomain, pengelolaan/kontrol aplikasi-aplikasi PD, pendampingan pembangunan aplikasi PD dan integrasi aplikasi-aplikasi PD.

d. Layanan Infrastruktur Jaringan TIK

Seluruh Perangkat Daerah di lingkup perkantoran Pemkot Cimahi telah tersambung dengan sambungan intranet. Sedangkan yang di luar lingkup perkantoran Pemkot Cimahi menggunakan jaringan *Fiber Optic*. Belum seluruhnya kantor layanan tersambung dengan *fiber optic* melainkan menggunakan saluran VPN. Kendala dalam layanan infrastruktur jaringan TIK yaitu:

1. Pusat Data/Data Centre belum memadai dan bercampur dengan ruang kerja administrasi.
2. Penggelaran Jaringan *Fiber Optic* belum menyeluruh sesuai dengan perencanaan.
3. Implementasi dan Optimalisasi Jaringan CCTV untuk kepentingan implementasi *Smart City* belum dilakukan.
4. Belum lengkapnya perangkat pendukung kinerja jaringan baik perangkat keras maupun perangkat lunak serta perangkat pengamanan jaringan di dalamnya.
5. Adanya ancaman akan keamanan jaringan yang terus meningkat yang harus segera diantisipasi segera.
6. Belum tersediannya kebijakan, standard dan prosedur.

e. Layanan Persandian

Layanan persandian meliputi layanan keamanan informasi, sertifikasi elektronik dan layanan persandian. Kendala yang dihadapi dalam layanan persandian adalah:

1. Kategori Sistem Elektronik tinggi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi membutuhkan minimal tingkat kematangan tata kelola yang Terdefinisi dan Konsisten (tingkat III) dengan kelengkapan control keamanan yang cukup lengkap. Mengacu pada hasil penilaian mandiri dengan menggunakan instrument Indeks KAMI, tingkat kematangan tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi baru ditingkat Penerapan Kerangka Kerja Dasar (tingkat II) dengan kelengkapan kontrol keamanan yang perlu perbaiki

2. Belum adanya dokumen perencanaan strategis persandian dan keamanan informasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan program/kegiatan bidang persandian dan keamanan informasi
3. Belum ada proses penilaian kinerja keamanan informasi untuk mengukur tingkat ketercapaiannya terhadap sasaran keamanan informasi
4. Kebijakan tata kelola keamanan informasi sudah ada, namun masih belum disesuaikan dengan regulasi maupun standar yang terbaru
5. SOP keamanan informasi yang ada saat ini belum memenuhi semua kebutuhan organisasi, dan masih mengacu pada regulasi maupun standar lama
6. Kurang optimalnya layanan persandian dan keamanan informasi karena belum tersediaannya sarana dan prasarana pendukung
7. *Security*, Keamanan Aplikasi yang telah dibangun, Keamanan Akses Jaringan Internet maupun Intranet dan ketersediaan Standar Teknis Penerapan Aplikasi disetiap SKPD;

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting terkait urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi, sebagai berikut:

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang telah mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2018. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;

3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

Menteri PANRB sebagai Ketua Tim Koordinasi bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan aktivitas SPBE Nasional, mengkoordinasikan proses bisnis pemerintahan, menetapkan aplikasi umum serta menetapkan manajemen SDM, manajemen risiko dan manajemen perubahan. Dalam unsur-unsur SPBE, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab pada perancangan dan pengimplementasian Arsitektur dan Peta Rencana SPBE pada domain Penyelenggaraan Pemerintahan, serta bertanggung jawab pada domain Layanan yang menyangkut urusan penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

b. Portal Satu Data Indonesia

Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah

melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan:

1. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
2. Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
3. Mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
4. Mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

c. *Command Centre*

Dalam rangka “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” Provinsi Jawa Barat akan membangun *Command Centre* untuk seluruh Kota/Kabupaten Jawa Barat dalam waktu 5 tahun, dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat. Pemberian bantuan diberikan secara bertahap tergantung pada kesiapan Kota/Kabupaten. *Command Center (Smart Digital Government Di Kabupaten/Kota)*, akan berfungsi sebagai sarana Monitoring Kinerja Perangkat daerah, *Monitoring Laporan Lapangan secara real time*, Penyajian Informasi Eksekutif, *Video Conference*, dan Presentasi.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2024 menyatakan bahwa tema pembangunan Tahun 2024 adalah

“Pemantapan Stabilitas Perekonomian dan peningkatan Sumber Daya Manusia”.

Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Cimahi Tahun 2024:

- Prioritas 1 : Penguatan kualitas pelayanan kesehatan
- Prioritas 2 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
- Prioritas 3 : Peningkatan aksesibilitas perlindungan dan pelayanan sosial
- Prioritas 4 : Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender
- Prioritas 5 : Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya
- Prioritas 6 : Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana
- Prioritas 7 : Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- Prioritas 8 : Peningkatan iklim investasi
- Prioritas 9 : Peningkatan daya beli masyarakat
- Prioritas 10 : Peningkatan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal
- Prioritas 11 : Menjaga ketahanan pangan daerah
- Prioritas 12 : Penyerapan tenaga kerja
- Prioritas 13 : Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota
- Prioritas 14 : Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan, dan kawasan permukiman
- Prioritas 15 : Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
- Prioritas 16 : Fasilitasi pemilihan umum serentak

Sesuai dengan tugas dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik maka secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Cimahi menjadi bagian dari upaya mendukung prioritas 15 yaitu Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan public yakni melalui layanan pengaduan masyarakat, layanan informasi, publikasi pembangunan dan pemerintahan, layanan penyelenggaraan elektronik *government* dan layanan pengelolaan data statistik.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) Kota Cimahi Tahun 2023, secara umum masyarakat Kota Cimahi mengharapkan komputerisasi dan pelatihan TIK. Sedangkan dari hasil Forum Perangkat Daerah yang melibatkan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang terkait dengan urusan-urusan dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi bahwa masyarakat Kota Cimahi pada hakekatnya mengharapkan peningkatan kinerja semua urusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Infrastruktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Arahan Pembangunan

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA.

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

- 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari Visi, Misi dan Agenda pembangunan secara nasional keterkaitan yang mengarah pada Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Misi, tujuan, sasaran dan target indikator utama (IKU) Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi adalah:

Tabel 3.1. Matriks Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No.	Misi Kota Cimahi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
				Uraian	Target
I	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.20
		Meningkatkan penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penyelenggaraan implementasi keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	84%
		Mewujudkan data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Statistik	3.00
		Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	370

No.	Misi Kota Cimahi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	
				Uraian	Target
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	55

3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, rencana kerja Dinas Komunkasi dan Informatika Tahun 2024 terdiri dari terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 Berdasarkan Rencana Startegis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026

**Indikasi Rencana Program dan Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	Target	Pagu Indikatif
1					2	3		4	5	6
2	10				Dinas Komunikasi dan Informatika					13.247.214.000
2					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai Angka	74,50 (BB)	7.102.911.800
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	50,50	
							Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai Angka	80,61	
					Kegiatan Administrasi Keuangan		Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	dokumen	12	6.558.189.000
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34	6.523.189.000
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	18	35.000.000
-	-	-	-	-	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah	Bulan	12	17.400.000
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	17.400.000

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	Target	Pagu Indikatif
1					2	3		4	5	6
-	-	-	-	-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	(keluaran) Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	bulan	12	233.922.800
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40	20.403.200
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15	15.459.000
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	23.111.600
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	174.949.000
-	-	-	-	-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	90.800.000
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16	41.000.000
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	16	3.800.000
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16	46.000.000
-	-	-	-	-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	bulan	12	124.000.000

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	Target	Pagu Indikatif
1					2	3		4	5	6
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	49.000.000
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	55.000.000
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	20.000.000
-	-	-	-	-	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	100	8.600.000
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	8.600.000
-	-	-	-	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	persen	100	70.000.000
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2	20.000.000
-	-	-	-	-	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	16	50.000.000
					BIDANG- BIDANG					
2	16				URUSAN KOMINFO					

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	Target	Pagu Indikatif
1					2	3		4	5	6
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	65	2.087.129.800
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase analisis berita yang berkonten positif	persen	84,00	2.087.129.800
2	16	02	2.01	05	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media		Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	10	1.723.265.000
2	16	02	2.01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	121.960.000
2	16	02	2.01	07	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	241.904.800
2	16	03			Program Aplikasi Informatika		Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	2,75	3.375.088.800
2	16	03	2.02		Kegiatan Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Persen	90	1.560.105.500
2	16	03	2.02	01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	307.400.000

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	Target	Pagu Indikatif
1					2	3		4	5	6
2	16	03	2.02	03	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	594.205.500
2	16	03	2.02	08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	1	75.000.000
2	16	03	2.02	09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	145.000.000
					Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3	438.500.000
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	persen	90	1.814.983.300
2	16	03	2.01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	75	1.814.983.300
2	20				URUSAN STATISTIK					
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Persen	47	263.938.600

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	Target	Pagu Indikatif
1				2		3		4	5	6
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Data Set	300	263.938.600
2	20	02	2.01	01	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	20	236.750.000
2	20	02	2.01	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemda Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi;	orang	60	27.188.600
2	21				URUSAN PERSANDIAN					
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	50	446.500.000
2	21	02	2.02		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	persen	18	80.000.000
2	21	02	2.02	01	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	5	80.000.000

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Satuan	Target	Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	persen	4	366.500.000
2	21	02	2.01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	86.500.000
2	21	02	2.01	04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	20	280.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Cimahi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.

Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi tahun 2024, terutama dalam rencana pencapaian kinerja.

Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam BAB III dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan asumsi penyediaan dana sesuai dengan yang diperkirakan. Rencana target kinerja dan anggaran belum mempertimbangkan aspek ketersediaan dana Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Cimahi, 2023
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA CIMAHI


HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720301 199203 1 012

Cascading Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi
Tahun 2024

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks SPBE	Indeks	3,00
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	2,50
				Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen	90%
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	75
				Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Persen	85
				Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1
				Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	1
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	80%
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	60%
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase analisis berita yang berkonten positif		82%
				Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12
				Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	10

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja
	Mewujudkan data statistik eektoral daerah yang berkualitas	Terwujudnya data statistik sektoral daerah yang berkualitas			Indeks Pembangunan Statistik	Level (Tingkat Kematangan)	2
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Persen	37%
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Data Set	250
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	20
				Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	45
	Meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintah daerah	Meningkatnya keamanan sistem informasi pemerintah daerah			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	351
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen	33,33%
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Persen	3
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	15
				Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi;	Persen	10
				Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	1
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Sakip Pemerintah Daerah	Nilai Angka	71 (BB)
					Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Angka	50,00
					Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai Angka	76,61
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Persen	100%
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	16
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah;		12
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	40
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	15
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	16
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	16
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	16
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	Bulan	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5
				Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen	100
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40
				Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	Dokumen	12
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	34
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	18


 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA CIMAHI
HENDRA GUNAWAN, S.Sos., M.I.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19720301 199203 1 012

CROSCUTTING SASARAN IKU



SEKRETARIS

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

KADISKOMINFO

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

KEPALA BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIKASI STATITIKA

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT

1. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

